

Samsul Hidayat

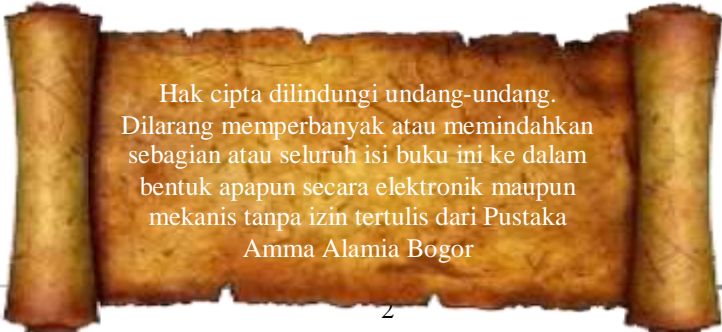
# Interelasi Agama & Budaya

Editor: Ahmad Jaiz

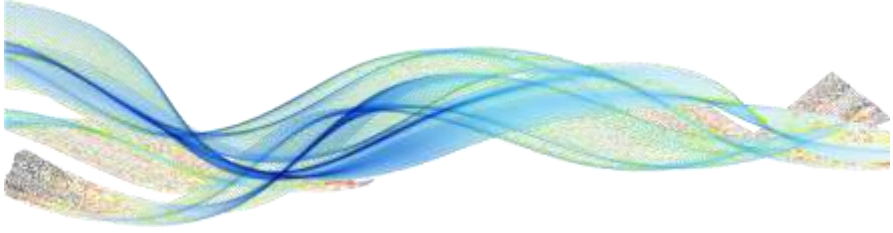


**Samsul Hidayat**

# **Interelasi Agama dan Budaya**



Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam  
bentuk apapun secara elektronik maupun  
mekanis tanpa izin tertulis dari Pustaka  
Ammal Alamiya Bogor



**Editor:**  
**Ahmad Jaiz**

Judul

**Interelasi Agama dan Budaya**

Penulis

**Samsul Hidayat**

Editor

**Ahmad Jaiz**

Desain Sampul dan Lay Out:

**Misno bin Muhammad Djahri**

Diterbitkan oleh:



**Pustaka Amma Alamia**

Sukaharja, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat

Telp. 085885753838

Email: [ambp1979@yahoo.com](mailto:ambp1979@yahoo.com)

[www.ammaalamia.blogspot.com](http://www.ammaalamia.blogspot.com)

Cetakan pertama: Nopember 2018

ISBN : 978-623-90318-0-0

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

## **KATA PENGANTAR**



Kita banyak bersyukur kepada Allah swt, atas anugerahNya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melahirkan karya tulis ilmiah yang dapat menjadi literatur akademik mahasiswa Studi Agama-agama dan pemerhati Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang saya buat selama studi S2 di Jurusan Perbandingan Agama (Religious and Cross Cultural Studies) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pada saat mengambil program Doktor/S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kajian terhadap Interelasi Agama dan Budaya terus berkembang melalui sentuhan para peneliti dan insan akademika di perguruan tinggi berdasarkan metodologi dan pendekatan

yang berbeda sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing peneliti.

Buku ini diharapkan dapat memperkaya referensi mahasiswa dan publik terkait dinamika dalam agama dan budaya serta kasus-kasus aktual yang terjadi sebagai dampak pergumulan agama dan budaya tersebut.

Kepada berbagai pihak yang mendukung selesainya karya ini saya haturkan terima kasih. Khususnya pada keluarga tercinta, Deni Dwi Yulianti dan anak-anakku Aura, Rafa dan Thara, kiranya kalian selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam melahirkan karya tulis yang bermanfaat bagi terawatnya multikulturalisme dan keberagaman yang damai dan harmonis di Indonesia.

Nopember 2018

## DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	5
A. Dasar Pemikiran .....	7
B. Tujuan.....	10
C. Metode.....	12
1. Melawan Kapitalisme Global.....	14
2. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.....	19
3. Cinta al-Qur'an: Tafsir Nature dan Nurture.....	26
4. Budaya MTQ dan Seni Merajut Harmoni.....	32

5. Ajaran Sesat Dan Problem Kebebasan Agama .....	36
6. Nestapa Ahmadiyah dan Problematika HAM.....	42
7. Dakwah-Misi Vis à Vis Kebebasan Beragama .....	48
8. Memahami Dialektika Agama dan Budaya .....	55
9. Politik dan Primordialisme Etno-Religius .....	61
10. Korupsi dalam Budaya Moral.....	67
11. Pesan Multikulturalisme Cap Go Meh Singkawang.....	74
BIBLIOGRAPHY .....	82
TENTANG PENULIS .....	86

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **BAB II INTERELASI AGAMA DAN BUDAYA**

## **BAB III KESIMPULAN**



# PENDAHULUAN



## A. Dasar Pemikiran

Salah satu tantangan masyarakat di era informasi dan digital adalah mengaburnya fungsi dan kedudukan agama sebagai wilayah yang privat dan terbatas melalui ekspansi kapitalisme yang masuk jauh merambah wilayah agama sehingga agama mengalami kekaburan fungsi sebagai pembentuk watak positif manusia. Salah satu anak kapitalisme adalah merebaknya komodifikasi agama yang menghadirkan agama sebagai nilai dan produk yang bisa diperdagangkan. Pola pikir masyarakat kapitalis menghadirkan agama sebagai nilai yang menguntungkan secara ekonomi, sehingga tidak jarang agama dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Maraknya penggunaan simbol yang berbau agama baik dalam dunia perbankan, industri film, iklan, sampai dengan urusan sandang dan pangan menjadikan agama selalu dimodifikasi dan dikonstruksi untuk memuaskan para kapitalis yang makin sulit dihindari.

Komodifikasi agama yang dikonstruksi secara negatif oleh para kapitalis menghadirkan budaya baru dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Saat ini masyarakat selalu berpikir instan dan ingin serba cepat mendapatkan sesuatu, termasuk dalam hal layanan keagamaan. Ada yang berpikir bagaimana agar bisa terlihat syar'i dengan mendadak menjadi hijabers, sebagian ingin mendapatkan pengetahuan atau ajaran tentang agama hanya dengan duduk manis di ruang tamu dengan menonton TV, sementara di toko-toko buku menghadirkan buku instan; cara cepat membaca al-Quran, cara cepat menghafal al-Quran, cepat memahami al-Quran dan seterusnya. Industri perbankan juga membuat daya tarik nasabah dengan menempelkan istilah-istilah syar'i dalam keuangan.

Pada bagian tertentu komodifikasi agama dapat bernilai positif sepanjang dipahami sebagai upaya atau strategi menyampaikan pesan-pesan agama agar lebih mudah dan cepat diterima masyarakat. Namun tidak sedikit yang melakukan komodifikasi terhadap agama semata untuk mendapatkan keuntungan semata. Akibatnya pemaknaan dan pengamalan beragama tergerus oleh nalar kapital yang hanya berpikir untung dan rugi, keluar dari *range* agama yang mengedepankan nilai-nilai ibadah.

Pertemuan nilai-nilai agama dalam wilayah sosio historis melahirkan budaya baru yang mau tidak mau memerlukan adaptasi dan konstruksi agar nilai agama dapat lestari dan menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan. Misalnya dalam dunia pendidikan, bagaimana pendidikan agama memerlukan wajah baru ditengah berbaurnya kebudayaan dari berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat memperbaiki karakter anak bangsa yang carut marut oleh ancaman penyakit sosial. Sementara itu, dibutuhkan pemahaman yang utuh dan moderat terhadap ayat-ayat suci yang mempertahankan kesucian normativitas dengan penyesuaian historitas di era multi keyakinan dan kelompok keagamaan. Misalnya bagaimana menghadapi perbedaan keyakinan yang berkembang disekitar kita seperti ajaran sesat, kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

Perbedaan keyakinan dan kultur melahirkan dinamika keberagaman yang tidak mudah, bahkan seringkali mengalami konflik sampai kekerasan fisik. Baik terhadap sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama, diperlukan gerakan bersama dalam sebuah budaya baru dan multikulturalisme yang mengutamakan kesepahaman ketimbang perbedaan. Budaya kesepahaman dalam hal menjalankan keyakinan masing-masing pemeluk menyangkut bidang pendidikan, politik, HAM, sampai

pada budaya moral terhadap persoalan bersama umat beragama seperti perilaku korupsi dan penyimpangan moral.

## **B. Tujuan**

Menulis tentang Interelasi Agama dan Budaya tidak hanya bertujuan untuk menambah gagasan dan pengetahuan yang sudah ada mengenai konsep hubungan antara agama dan budaya yang saat ini mewarnai dinamika keberagamaan umat. Secara spesifik, tulisan ini mengurai hubungan agama dan budaya dalam konteks pergumulan agama ditengah budaya yang berubah, dalam hal ini bagaimana menyebarkan pesan agama agar dapat menjadi budaya hidup dan panduan kehidupan beragama.

Pada kajian terkait agama dan kapitalisme, diuraikan paradigma Islam tentang kapitalisme global, mencakup beberapa kelompok; Paradigma Tradisionalis, Paradigma

Modernis atau Islam Liberalis, Paradigma Revivalis atau Fundamentalis, dan Paradigma Teologi Islam Kiri, yang tampaknya paling mampu dalam melawan kapitalisme global.

Dalam konteks pendidikan agama, saat ini kritik dan keluhan masyarakat terkait tidak mampunya pendidikan agama

dalam mengubah perilaku anak didik. Banyak sekali ditemukan kejadian memilukan terkait perlakuan guru kepada murid atau murid kepada guru, masih banyaknya kasus kekerasan, intoleransi di sekolah sehingga masih banyak yang apatis terhadap kemampuan pendidikan agama meningkatkan kesadaran siswa dalam berperilaku yang baik.

Selain ini tulisan ini bertujuan menguraikan persoalan kebebasan beragama dan hak menjalankan agama sesuai keyakinan yang masih menjadi momok menakutkan dalam konstruk kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana memperlakukan ajaran dan kelompok yang berbeda dari mainstream dan membangun jalan dialog agar terjadi peningkatan jaminan melaksanakan keyakinan dan kerjasama antar penganut.

Selain itu, pertemuan agama dan budaya dalam ranah kehidupan patut mendapat perhatian serius. Seringkali ditemukan konflik sosial di masyarakat pada saat-saat tertentu seperti pemilihan presiden atau legislatif dibumbui dengan unsur agama sehingga budaya konflik dalam dunia politik yang membawa sisi primordialisme etnik religious patut untuk dibaca sebagai sebagai sebuah penyakit kronis yang dapat

menjadi ancaman kerukunan dan harmoni umat beragama. Begitupun problem budaya korupsi dikalangan aparat Negara menjadi tugas bersama seluruh komponen umat beragama, baik individu maupun kelompok atau organisasi keagamaan sehingga peran agama dapat selalu fungsional di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen.

### **C. Metode**

Studi tentang Interelasi Agama dan Budaya menggunakan metode pustaka melalui pencarian data primer yang terkait hubungan agama dengan budaya dalam konteks pendidikan, politik, HAM, dan moral. Penulis menggunakan pendekatan tematik untuk mengelompokkan dan mengkaji hubungan agama dan budaya. Pendekatan ini bermanfaat dalam cara penulis mengorganisasikan dan merangkum sumber-sumber pustaka yang relevan dengan thema yang dibahas.

Data tulisan penulis analisis dengan metode kualitatif karena metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan jika terdapat data-data ganda. Berhubung analisis

kualitatif lebih mengutamakan data, (Suprayogo, 2001:75) maka penulis akan melakukan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola tertentu, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerja sehingga tersusun data yang sistematis. Selanjutnya data akan dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan dalam rumusan masalah untuk berikutnya diolah dan dimaknai sesuai dengan kebutuhan penulisan. Terakhir, metode penyajian analisis data dilakukan dalam bentuk narasi dan deskripsi.

### **BAB III**

## **INTERELASI AGAMA DAN BUDAYA**



## **1. Melawan Kapitalisme Global**

Kemajuan peradaban dunia, selain telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi manusia, juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang mau tidak mau harus dihadapi. Salah satunya adalah Kapitalisme Global. Dalam konteks ini, kapitalisme global dimaknai sebagai “Sebuah era dimana peran modal begitu dominan dalam menentukan arah kebijakan sosial, ekonomi bahkan politik suatu Negara.” (Eko Prasetyo, 2002) Dalam pengertian demikian, kapitalisme telah menjelma menjadi sebuah ancaman bagi suatu Negara. Sebab dengan segala atributnya kapitalisme global mampu dan telah terbukti mencerabut kedaulatan yang dimiliki oleh suatu Negara dan menjadikannya sebagai boneka di bawah kekuasaan pemegang kekuatan-kekuatan multi dimensi dan multi nasional.

Pada sisi lain, kapitalisme global telah membangun sekatsekat yang rapi. Dalam ranah sosial, melalui kapitalisme global nilai-nilai ekonomi lebih diunggulkan ketimbang nilai-nilai lainnya, untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai status sosial manusia. Akibatnya, jelas muncul golongan-golongan sosial baru, yakni kelas sosial yang mengeruk



pendapatan dan keuntungan dari kelebihan modal yang mereka miliki. Sedangkan bagi kelompok sosial yang tidak memiliki modal, status sosial mereka akan jatuh pada kelas terbawah dan seringkali menjadi pihak yang tereksplorasi secara berlebihan.

Bangunan sekat-sekat kapitalisme lebih jauh telah merambah wilayah agama dengan meletakkan fungsi dan kedudukan agama dalam wilayah privat atau terbatas, sehingga agama kehilangan kekuatannya dalam membentuk watak dinamis positif manusia. Dalam kedudukannya sebagai urusan individu-individu, pelan tapi pasti agama berikut ajaran norma, etika serta nilai-nilai universalnya telah dilupakan, diganti dengan “isme-isme” baru yang dianggap lebih manusiawi dan menopang pondasi kapitalisme.

Sedemikian dahsyatnya serangan kapitalisme, sehingga wajar jika pertanyaan yang bernada pesimistis muncul; kekuatan apa lagi yang bisa membendung arus kapitalisme global ini? Sejenak harapan kita masih tertumpu pada kekuatan etika.

Menurut Majid Fakhry (1996), teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan

atau dilarang, boleh atau tidak. Karena itulah, ketika Islam menjadi atribut bagi definisi etika, maka yang dimaksud adalah dasar perbuatan dan keputusan yang merujuk pada nilai-nilai universal Islam sebagaimana terdapat dalam ajaran-ajarannya.

Sebagai kerangka rasional dari perbuatan dan keputusan, etika dapat dibedakan menjadi “etika sebagai praksis” dan “etika sebagai refleksi”. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai atau norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Atau etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Ketika kapitalisme global dimaknai sebagai suatu kondisi riil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memunculkan teramat banyak persoalan, maka definisi etika sebagai praksis atau aturan yang harus dilakukan lebih tepat untuk dipilih ketimbang etika sebagai refleksi. Alasannya, karena untuk mengatasi problem riil dalam masyarakat tidak cukup dengan mengajukan konsep atau teori-teori tertentu. Inilah yang oleh K. Bertens (1993) sebagai “applied ethics,” yaitu suatu pendekatan dalam studi etika dengan menekankan pada kemungkinan untuk menerapkan pemikiran etika atas beberapa bidang praktis. Akan tetapi,

pembahasan kapitalisme global dalam perspektif etika Islam terkait erat dengan pandangan umat Islam sendiri terhadap kapitalisme global itu sendiri.

Paradigma Islam tentang kapitalisme global paling tidak mencakup beberapa kelompok: *Pertama*, Paradigma Tradisionalis, yaitu pemikiran tradisionalis Islam yang memandang bahwa masalah miskin dan kaya pada hakikatnya adalah ketentuan Tuhan semata. Dalam pandangan yang demikian, masalah kemiskinan dan marginalisasi yang menimpa umat sama sekali tidak terkait dengan globalisasi dan neoliberalisme. Sebaliknya, kondisi ini dianggap sebagai ujian Tuhan atas keimanan seseorang. *Kedua*, Paradigma Modernis atau Islam Liberalis, dimana pemikiran mereka sejalan dengan paham modernisasi sekuler yang percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin pada dasarnya berakar dari kesalahan “sikap mental, budaya maupun teologi mereka.” Tetapi kemiskinan umat bagi mereka juga tidak ada sangkut pautnya dengan menguatnya paham neo-liberalisme maupun globalisasi. Kelompok ini melawana siapa saja yang menghalangi modernisasi dan pembangunan melalui agenda sekularisasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa keterbelakangan umat karena melakukan sakralisasi terhadap semua aspek kehidupan.

*Ketiga*, Paradigma Revivalis atau Fundamentalis, yaitu kelompok yang melihat baik faktor internal maupun eksternal sebagai akar penyebab kemiskinan yang menimpa umat. Adapun faktor internal adalah sikap mental umat itu sendiri, sementara faktor eksternal lebih disebabkan oleh kecenderungan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang lebih gandrung pada isme-isme impor daripada mengedepankan nilai-nilai yang mereka miliki. Globalisasi dan kapitalisme global bagi mereka tidak lain adalah agenda Barat dan konsep non Islami yang dipaksakan untuk umat Islam dan masyarakat Indonesia.

*Keempat*, Paradigma Teologi Islam Kiri, yang tampaknya paling mampu dalam melawan kapitalisme global. Menurut kelompok ini, kemiskinan yang dialami umat disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik dan pemaksaan kultur global. Oleh karena itu agenda utama mereka adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental baru dan lebih adil di bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Setidaknya ada beberapa tawaran yang mereka ajukan yaitu reformasi HAM, pendidikan yang memanusiakan, kesempatan memperoleh akses ekonomi, sosial dan politik, serta pembangunan teologi

dan sikap mental. Agenda-agenda inilah yang diharapkan menjadi kekuatan dan daya saing bagi umat Islam saat ini.

Hanya saja, nampaknya masih ada satu hal terlupakan dari agenda yang mereka usung, yaitu revitalisasi etika sebagai basis sikap mental dan kekuatan umat. Dalam hal ini etika Islam menemukan relevansinya, sebab etika tidak semata dimaksudkan sebagai ajaran tentang moral yang mengawangawang tetapi lebih dari itu menjadi pedoman dalam menetapkan agenda aksi yang lebih sistematis. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya kesadaran akan peranan penting dimensi etis dalam setiap tindakan, maka suatu bangsa dapat membangun citranya sendiri, tanpa mengorbankan kepentingan bersama, dan dengan tanpa menyingkirkan kearifan lokal, baik dari segi sosio politik kebudayaan dan ekonomi yang selama ini telah terbangun.

## **2. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural**

Saat ini pendidikan agama baik di sekolah maupun perguruan tinggi mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan agama tidak berdampak pada perubahan perilaku anak didik setelah

mengalami proses pendidikan tersebut. Meskipun di beberapa sekolah pendidikan agama diberikan dengan porsi yang cukup besar, namun tetap tidak mampu mencegah anak berperilaku buruk seperti pergaulan bebas, kekerasan, tawuran, sikap kurang ajar, berpikiran sempit (dogmatis), kurangnya toleransi dan menghargai orang lain. Tidak heran jika banyak orang menjadi apatis dengan pendidikan agama, dan mempertanyakan sejauh mana efektifitas mata pelajaran tersebut bagi peningkatan kesadaran siswa baik secara kultural maupun agama.

Padahal salah satu modal penting dalam mengembangkan keberagaman yang inklusif dan pluralis adalah melalui pendidikan agama. Di era multikulturalisme ini, pendidikan agama merupakan pilar penyangga kerukunan umat, sehingga diharapkan tidak saja menjadi fondasi integritas nasional yang kokoh, tetapi juga menjadi fondasi pengayom keberagaman yang sejati (*genuine pluralism*).

Sayangnya, pendidikan agama selama ini kurang bisa diharapkan kontribusinya dalam pembentukan masyarakat yang menghargai pluralisme, dan cenderung tidak menunjang demokratisasi. Hal ini disebabkan karena para guru agama umumnya masih menekankan segi kognitif dan hafalan semata,

sementara ajaran agama disampaikan secara melulu teologisindoktriner, menekankan eksklusifitas dan mengabaikan aspek pluralitas, sehingga makin membentuk chauvinisme rasa kebenaran pada agamanya sendiri. Selain itu masih lemahnya dukungan suasana dan sistem yang kondusif bagi perkembangan perilaku siswa yang lebih baik. Misalnya jika di sekolah tradisi penghormatan satu sama lain kurang, baik karena etnik, budaya atau agama yang berbeda, maka tentu sulit diharapkan kepada siswa untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dampaknya, pengajaran agama menjadi kurang menyentuh aspek realitas sosial yang sesungguhnya dan tidak sampai pada aksi nyata dari proses perilaku keagamaan. Untuk itu model pendidikan agama gaya lama yang cenderung eksklusif, dogmatis, mengacu pada masa lalu yang kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu didekonstruksi atau dibongkar, kemudian dimunculkan model pendidikan yang menghargai kemanusiaan, membebaskan dari penindasan, memupuk persaudaraan, dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.

Pendidikan agama haruslah diubah orientasi dan metodologinya. Pendidikan agama seyogianya bukan hanya berisi pengajaran tentang ajaran-ajaran agama dan kepercayaan ketuhanan semata. Namun, pendidikan agama harus memaparkan realitas sosial dan problem empirik, bervisi emansipatoris, dan menghindarkan diri dari indoktrinasi. Dengan begitu, pendidikan agama dapat menghasilkan pendidikan moral kemanusiaan yang berjiwa agama.

Pengembangan pendidikan agama berwawasan multikultural dapat diterapkan pada beberapa aspek; orientasi muatan (kurikulum), orientasi siswa dan orientasi reformasi persekolahan. Di dalam pendidikan yang berorientasi pada muatan, J. A. Banks (1999) menawarkan kerangka reformasi kurikulum dengan beberapa pendekatan; Pertama, *pendekatan kontributif*, dimana tujuan utama pendekatan ini dalam muatan kurikulum adalah untuk memasukkan materi-materi tentang keragaman kelompok-kelompok keagamaan (termasuk kelompok etnik dan kultural).

Kedua, *pendekatan aditif* yaitu mengambil bentuk penambahan muatan-muatan, konsep-konsep kedalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan



pendekatan ini, pendidikan agama memanfaatkan muatanmuatan khas multikultural sebagai pemer kaya bahan ajar; konsep-konsep tentang harmoni dan kehidupan bersama antarumat beragama memberi nuansa untuk mencairkan kebekuan “*state of mind*” siswa (dan guru) dalam merespon eksistensi agama-agama lain; tema-tema tentang toleransi, koeksistensi, pro-eksistensi, kerjasama, saling menghargai, saling memahami antarpenganut agama-agama yang berbeda.

Ketiga, *pendekatan transformatif* yang berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep, isu-isu lama, kemudian memperbarui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnik. Aplikasinya dalam pendidikan agama, berarti membuat konsep dan isu baru dengan pendekatan perbandingan, yaitu membuka perspektif kelompok-kelompok “*outsider*” untuk memberi komentar dan penjelasan terhadap materi yang dibahas.

Keempat, *pendekatan aksi sosial*, yaitu pengkombinasian pendekatan transformatif dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk melakukan perubahan sosial. Dalam konteks pendidikan agama, maka siswa tidak hanya diajak untuk

memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, namun juga aktif di lapangan melakukan sesuatu, seperti yang berhubungan dengan isu-isu konflik keagamaan, dimana seorang siswa dituntut mampu berperan aktif memecahkan masalahnya sesuai dengan kapasitasnya.

Di samping itu, pengembangan pendidikan agama juga dapat diorientasikan pada siswa, dimana program perlu melihat latar belakang kultural dan keagamaan siswa guna melakukan transisi ke dalam *mainstream* pendidikan. Bentuknya dapat seperti program lintas batas, studi bersama antaragama, antaretnik atau antargender. Dalam proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan pembuatan kelompok belajar yang di dalamnya terdiri dari siswa-siswa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan, atau dengan mengakomodir keragaman etnik, gender, dan kebudayaan. Jadi dapat dibayangkan betapa dinamisnya sebuah kelas yang belajar dengan model semacam ini. Misalnya, ketika tema yang diangkat tentang sex bebas dan aborsi, maka suatu kelas dengan seluruh keragaman tadi akan memberi pengayaan terhadap masalah yang dibahas sesuai dengan perspektif agama dan budayanya masing-masing.

Interaksi langsung lintas budaya dan agama ini akan memperkaya horizon keagamaan siswa, mengurangi bias, stereotip, dan prasangka atas dasar sentimen keagamaan. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas semua distorsi dan manipulasi pengetahuan yang selama ini terjadi dan terpatrit dalam pikiran-pikiran mereka sendiri, yang bisa jadi karena merupakan warisan orang tua, lingkungan dan tradisi secara turun temurun.

Disamping orientasi pendidikan yang mengacu pada muatan dan pada siswa, pendidikan agama berwawasan multikultural dapat dilengkapi dengan melakukan reformasi persekolahan (*schooling*) dan konteks kultural dan politik dari persekolahan, yang menekankan relasi antarmanusia dalam semua bentuknya, didesain untuk merekonstruksifikasi dan menghilangkan segregasi sekolah-sekolah, dan dirancang untuk meningkatkan semua bentuk kontak dan perjumpaan antaragama, antar-etnik dan antarkultur.

Dengan demikian pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada pada setiap agama, kemudian direkonstruksi secara

komprehensif dan dinamis dalam upaya membangun suatu masyarakat yang bermoral dan beradab.

### **3. Cinta al-Qur'an: Tafsir Nature dan Nurture**

Ketika membaca al-Qur'an, kita terbiasa berhenti pada tanda-tanda waqaf dan tanda-tanda ayat. Jika mengacu pada tauqifi atau ketetapan Allah swt, maka sebenarnya tanda berhenti baca hanyalah berdasarkan berhentinya tanda ayat, bukan pada tanda waqaf. Rambu-rambu tanda baca seperti tanda waqaf tidak lebih dari buatan ulama yang bertujuan agar umat yang membaca dapat lebih memahami pengertian ayat melalui tanda baca yang sesuai dengan tata bahasa yang berlaku ditempat tersebut.

Tanda-tanda alami (nature) dalam beragama dapat dipahami sebagai apa yang Allah swt kehendaki atau tuliskan dalam ayat-ayatnya baik qauliyah maupun kauniyah. Namun dalam banyak hal, manusia melakukan penyesuaian berdasarkan pola kebiasaan pemikiran dan perilaku yang disepakati sebagai sebuah konteks yang sesuai kebutuhan zaman (nurture).

Sebagai contoh manusia diberikan Allah swt kodrat rasa lapar. Rasa lapar adalah alami, asli buatan Tuhan yang mendorong manusia untuk mengonsumsi sesuatu. Namun pada umumnya manusia makan tidak berdasarkan peringatan alami yang dianugerahi Tuhan pada sistem pencernaan mereka. Seseorang membuat aturan atau kebiasaan pola makan pagi, siang dan malam meskipun dalam kondisi sudah kenyang. Seringkali juga pada saat belum benar-benar lapar seseorang sudah kembali makan karena kebiasaan pola makan yang dibuat. Jadilah kemudian tanda-tanda alami dari Tuhan kita sesuaikan dengan pola tertib sosial kebudayaan yang berlaku.

Begitupun pada susunan ayat dan surat al-Qur'an yang pada awalnya alami, namun kita sesuaikan dengan pola tertib sosial yang berlaku. Al-Qur'an merupakan samudera makna dan hikmah yang berharga bagi kehidupan manusia. Namun pemaknaannya (tafsir) berada ditangan manusia. Hal itulah yang membuat manusia memerlukan rambu-rambu agar mampu memaknai sedekat mungkin dengan kehendak Allah swt sebagai pemilik al-Qur'an.

Pola-pola nature dan nurture banyak berulang dalam kehidupan keagamaan. Misalnya dalam memahami sifat-sifat

Allah, adalah hal yang sulit bagi umat awam untuk belajar langsung dari al-Qur'an. Lalu muncullah ulama-ulama seperti dari Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk para ahli tasawuf Islam menyusun sifat-sifat Allah dalam kitab-kitab aqidah agar dapat dipahami umat. Umat menerimanya dalam bentuk nyanyian atau senandung sifat-sifat Allah yang Wujud, Qidam, Baqa, dan seterusnya yang sebenarnya tidak terdapat secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Banyak ulama yang mengedepankan konsep kembali kepada al-Qur'an (maudhu'i). Jika mengacu pada konsep nature diatas, maka kembali ke al-Qur'an bermakna kembali ke bentuk alami, dasar atau murni dari Allah swt. Persoalannya adalah siapa yang bisa menghindari pengaruh didikan guru, ulama, referensi dan literatur yang kita ikuti dan kita kaji. Dalam perpustakaan Islam, ditemukan ribuan kitab fiqih yang membagi pembahasan dalam berbagai bab seperti thoharoh, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Para auliya terdahulu dan kini terus menyusun tema-tema kajian agama (termasuk tafsir) untuk memudahkan kita memahami dalil dari sumber asalnya yaitu al-Qur'an. Artinya pada saat kita kembali kepada al-Qur'an, sebenarnya kita tidak benar-benar meninggalkan hasil didikan

dan pengetahuan yang kita dapatkan dari kitab fiqih dan tafsir yang diajarkan para guru dan ulama kita.

Jadi jika al-Qur'an itu nature, asli dan murni dari Allah swt, maka perlu disadari bahwa mazhab tafsir, mazhab fiqih, mazhab teologi, mazhab kalam, mazhab tasawuf adalah hasil pemikiran, pengalaman, didikan dan konstruk manusia. Jika dalam Islam ditemukan berbagai aliran, mazhab, organisasi dan lembaga seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Washliyah, atau seperti aliran Sunni, Syiah maupun Wahabi, Ahlus Sunnah, Salafi dan sebagainya, tidak lain tidak bukan adalah produk didikan, pengetahuan dan pemahaman manusia terhadap yang dari Allah swt. Betapapun beragam dengan perbedaan yang nyata, semua aliran atau mazhab tadi harus mampu memuliakan, merawat, menjaga, melestarikan dan mengembangkan pemahaman tentang al-Qur'an.

Itulah salah satu kebaikan dari maksud Allah swt menciptakan perbedaan dan keragaman dalam berbagai hal termasuk keyakinan dan prinsip keagamaan, agar semua kelompok tadi dapat saling memahami, berlomba-lomba pada yang baik saja, tidak lalu melakukan kejahatan dan saling sikut, saling menuduh, saling mengklaim paling benar yang pada

akhirnya akan menjauhkan kita dari umat yang rahmatan lil alamin.

Prinsip nature dan nurture adalah setting terbaik dan kebijaksanaan Tuhan dalam menjadi al-Qur'an sebagai mukjizat yang sebenar-benar mukjizat. Mungkin ada yang berfikir bukankah proses alami atau nature itu justru bertolak belakang dengan mukjizat?. Selama ini kita memahami mukjizat hanya dikhususkan pada hal-hal tertentu saja. Padahal jika ditelusuri mukjizat itu artinya keajaiban, sementara bukankah setiap ciptaan asli dari Allah swt adalah juga sebuah keajaiban?. Ketika anak kita lahir, kita mensyukurinya dan merasakannya sebagai sebuah keajaiban. Ketika Allah swt tiba-tiba menurunkan hujan disaat kemarau atau sebaliknya, kitapun mensyukurinya sebagai sebuah keajaiban.

Al-Qur'an adalah mukjizat atau keajaiban yang paling utama dibandingkan dengan berjuta-juta keajaiban. Jika ada yang berpandangan bahwa membandingkan keajaiban alQur'an dengan yang lain tidak tepat karena menjadikan alQur'an seperti makhluk-makhluk Allah swt yang lain yang bersifat baru dan rusak, maka hal tersebut tidak lebih karena faktor didikan dan pengetahuan (nurture) yang berbeda pada setiap orang sehingga



setiap umat bebas memilih mazhab dan organisasi Islam yang diinginkannya.

Tentu saja akhirnya kita harus berterimakasih, menyayangi, dan menghormati kontribusi Imam Ghozali, Imam Syafi'i, Syaikh Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Alfarabi, Alkindi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan segenap para ulama dan tokoh agama lainnya. Namun ilmu mereka adalah ilmu manusia yang pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Justru dengan menempatkan para ulama tersebut sebagai guru kita dalam mendidik alam atau nature, semoga kita semakin mahir mensyukuri anugerah Allah swt, dan terampil dalam memuliakan, merawat, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan pemahaman kita tentang al-Qur'an. Dengan memuliakan warisan karya para auliya baik yang lampau maupun sekarang, diharapkan kita semakin mampu menemukan mutiara-mutiara hikmah dalam al-Qur'an.

Sungguh al-Qur'an itu sendiri sebenarnya adalah Hikmah (QS 2:151 dan QS 36: 2). Qur'an adalah perkataan Allah swt yang disampaikan Muhammad (perkataan pesuruhku yang mulia) (QS 60:49). Mengapa al-Qur'an disebut sebagai mukjizatnya nabi Muhammad? Karena Qur'an itu adalah hatinya

Muhammad (QS 2: 97). Oleh sebab itu, untuk mendapat Hikmah sejati, maka kita harus mengikut rasul. Jika ada umat yang menyebut dirinya pengikut Muhammad, maka secara otomatis dirinya mengikuti Allah melalui al-Qur'an.

#### **4. Budaya MTQ dan Seni Merajut Harmoni**

“Dakwah Islam bersifat merangkul bukan memukul, mengajak bukan mendepak.”. Demikian pernyataan Prof. Din Syamsuddin, mantan Ketua PP Muhammadiyah dalam sebuah seminar di Vatikan beberapa waktu yang lalu. Pernyataan tersebut menjadi sangat relevan dengan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang rutin diadakan mulai level nasional sampai tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Hal ini karena event MTQ merupakan sebuah perpaduan harmonis antara seni, dakwah dan kerukunan. Islam memang mengajarkan metode berdakwah yang elegan, moderat dan penuh kesantunan ditengah pluralisme sosiologis masyarakat.

Sebagai sebuah perlombaan (musabaqah), MTQ mengandung nilai-nilai yang holistik, dimana seni sebagai

ekspresi jiwa dan budaya yang mengungkapkan keindahan, berpadu dalam sentuhan Islam yang menuntun dan mengajarkan manusia arti kebaikan, keindahan dan keharmonisan. Ruh dari MTQ adalah menghidupkan al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya. Orientasinya diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan demi mempererat hubungan pada Tuhan dan antar sesama manusia. Sebagai rahmat bagi semesta alam, maka umat Islam ingin membuktikan bahwa meskipun pluralisme sosiologis dapat menimbulkan implikasi negatif, namun umat perlu berusaha agar pluralisme tersebut justru dapat dijadikan sebagai kekuatan yang sinergis bagi penciptaan masa depan bangsa yang lebih baik.

Menghadapi kondisi pluralitas sosiologis kultural ini, perlu diingat Allah swt pun telah menyatakan keanekaragaman tersebut (QS. Ar Rum:22), bahwa manusia ciptaan-Nya itu berbeda-beda, baik bahasa maupun kulit serta agamanya. Perbedaan tersebut harus diterima sebagai kenyataan positif karena hal itu merupakan salah satu tanda kekuasaan tuhan dan justru perbedaan tersebut dapat menjadi sarana berlombalomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*). Islam juga telah menggariskan sikap menghadapi kondisi keberanekaragaman tersebut dengan sikap etis (QS al Hujurat:13), bahwa umat perlu mengenal dan menghargai satu sama lain, serta

berupaya mencari titik temu (QS 3:63) untuk mendapatkan satu pandangan (kalimah sawa') sebagaimana yang dikembangkan Nabi Muhammad saat berada di Madinah.

Dengan demikian MTQ tidak saja sekedar menjadi ajang pentas kesenian Islam, tapi juga diharapkan mampu menyuburkan ayat-ayat kerukunan yang selama ini telah terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. MTQ kali ini harus mampu menggemakan suara tabuh harmoni di tengah kompleksitas dan keragaman masyarakat khususnya di Kalimantan Barat, sebab tanpa harmoni, maka MTQ bisa jadi hanya akan menjadi ironi. Dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini biasanya tidak sedikit Sebagai masyarakat muslim kita sepatutnya malu jika acara MTQ seperti "dipaksa" harus semewah dan sespektakuler mungkin yang justru akan berpotensi mengalami pemborosan yang tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas keimanan dan kerukunan masyarakat.

Festival MTQ merupakan ajang untuk menyemarakkan syiar agama Islam, dan sebagai media untuk meningkatkan kegairahan dalam membaca dan memahami Al-Quran, serta menciptakan kehidupan yang Islami melalui aplikasi konkrit

dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al Quran mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari tata cara beribadah, bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, hingga aspek penegakan hukum, akhlak dan moral, termasuk juga urusan perdagangan, politik, pendidikan, pergaulan dan sebagainya, maka umat Islam hendaknya senantiasa mempedomani Al Qur'an karena hanya dengan cara itulah akan terbentuk manusia beriman, bertaqwa, menjunjung tinggi supremasi hukum, menjauhi kekerasan, memelihara silaturahmi dan persaudaraan serta mengedepankan kerukunan antarsesama.

Dengan demikian, pembumian Al Quran dalam kehidupan inilah yang seharusnya menjadi fokus utama dalam dakwah. Bagaimana ajaran Islam dapat diterima masyarakat secara baik dalam suatu penyampaian yang baik pula. Bagaimana keteladanan menjadi sebuah keharusan ditengah sulitnya mencari figur-figur pemimpin dan ustadz yang menyejukkan hati umat. Bagaimana pemerintah dan masyarakat secara kolegiat berusaha sekuat tenaga menahan lajunya tingkat kriminalitas, kejahatan moral dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

MTQ dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan diatas jika makna MTQ tidak dipahami sebagai ajang

persaingan, sekedar berebut menjadi juara, atau menjadi yang terbaik. Ironisnya lagi jika MTQ malah dijadikan sebagai propaganda dan komoditas politik bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi semata. Jika sudah demikian, maka harapan agar MTQ dapat menjadi media dakwah dan wahana merajut persaudaraan dan kerukunan tidak lebih dari sebuah basa basi. Sebelum hal tersebut terjadi, mari luruskan niat dan tujuan, kiranya festival dakwah Islam ini benar-benar memberikan kontribusi positif bagi meningkatnya semangat keberislaman dan kerukunan di tengah masyarakat.

## **5. Ajaran Sesat Dan Problem Kebebasan Agama**

Maraknya ajaran yang dianggap sesat oleh paham *mainstream* Islam (Sunni) Indonesia saat ini, seolah mengingatkan kita dengan kasus-kasus sebelumnya, dimana penyelesaian akhirnya hampir selalu berujung dengan teror dan anarkisme pada pihak yang dianggap bersalah. Sebut saja misalnya Jemaat Ahmadiyah yang mengalami pengusiran, kekerasan baik fisik maupun mental, sampai akhirnya kasus yang paling hangat dibicarakan, Kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang akhirnya ditutup aktifitasnya secara paksa.

Terlepas dari perdebatan apakah kelompok tadi menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, permasalahan yang ingin dikupas disini adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan dan hak warga negara Indonesia dalam memeluk dan menjalankan keyakinan yang dianutnya? Hal ini menjadi penting karena negara Indonesia menganut asas Pancasila dan memiliki UUD 1945 yang secara jelas memberikan kebebasan kepada tiap warga untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Namun faktanya, pemerintah tidak memberikan apresiasi yang memadai terhadap persoalan tersebut, bahkan tidak jarang negara justru melakukan pengekangan hak-hak beragama warga negaranya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks, karena elite dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene merupakan representasi keberagaman masyarakat tidak memberikan pengayoman dan perlindungan maksimal bagi kelompok non mainstream ini, bahkan beberapa diantara kelompok minoritas ini difatwakan sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Dampaknya, fatwa ini memicu anarkisme masyarakat muslim di berbagai daerah. Mirisnya ketika masyarakat telah menjadi begitu brutal, dengan menganiaya warga dan merusak hak-hak milik orang lain, MUI belum

mampu menjadi mediator yang tepat guna mendamaikan kelompok yang berseteru. Saat ini persoalan hubungan antara kelompok mainstream dan minoritas di Indonesia masih seperti bara dalam sekam yang belum benar-benar padam dan mendapat solusi yang tepat.

Bagi sebuah negara yang plural dari segi keberagamaannya, pengakuan kebebasan beragama tentu akan memberikan rasa tenteram bagi warganya. Setiap keyakinan agama mendapatkan kedudukan yang sama dan menjadi sumber moral dan sumber hukum tanpa adanya pengakuan khusus bagi agama tertentu di atas agama lain. Di negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan, pemerintah seharusnya tidak melakukan pembatasan terhadap sejumlah agama yang dipeluk dan tidak melakukan “pembredelan” terhadap aliran atau paham agama apapun. Pemerintah yang bertindak terlalu formal dan birokratis dalam memandang eksistensi agama, merupakan satu bentuk hegemoni yang berlebihan, dimana agama diatur dengan kekuatan yang bersifat mengekang, bahkan cenderung diskriminatif.



Sampai saat ini jaminan kebebasan beragama di Indonesia masih patut dipertanyakan. Hak kebebasan beragama sesungguhnya bukanlah pemberian negara atau pemberian golongan. Negara berkewajiban melayani kehidupan beragama warganya secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu negara juga harus mendorong kepada semua umat beragama untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi kekuatan legitimatif yang dapat menumbuhkan religiositas dalam masyarakat. Dorongan ini merupakan bentuk pelayanan negara dan tugas yang wajar selaku pemerintah, sementara perkembangan religiositas diserahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Namun negara seringkali bertindak sebagai superstruktur atas agama, dan menjadikannya sebagai kekuatan yang “mengatasi” agama.

Dalam hubungannya dengan pemberian hak-hak menjalankan keyakinan seperti pada ajaran atau paham yang diluar *mainstream* mayoritas, maka negara seharusnya menempatkan posisi yang jelas dalam hal memberikan kewenangan dan perlindungan bagi komunitas keyakinan manapun. Namun mungkin perlu dipilah mana wilayah-wilayah yang tidak boleh diatur oleh negara sama sekali, dan mana yang masuk ke dalam publik. Hal-hal yang bersifat privat misalnya

keyakinan pada Tuhan, Nabi, Kitab dan Hari akhir adalah wilayah-wilayah *aqidah* yang tidak bisa diseragamkan oleh siapapun. Termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dianggap memiliki otoritas tunggal dalam menafsirkan ajaran Islam. Sedangkan dalam hal yang bersifat publik misalnya dalam persoalan *muamalat* (etika perdata), *jinayat* (pidana) dan *siyasah* (etika mengelola kekuasaan dan kekayaan negara), maka negara dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga agama dalam upaya memperkaya hukum-hukum negara.

Fakta masih seringnya terjadi kekerasan dan teror bagi kelompok yang dianggap sesat mencerminkan adanya pergumulan yang serius tentang batas-batas kebebasan beragama di Indonesia, termasuk dampaknya bagi aliran-aliran diluar *mainstream* apakah seharusnya dilindungi atau tidak. Masalah ini cukup sulit untuk dijawab karena belum ada kesepakatan kolektif tentang sampai sejauh mana “kebebasan beragama” di Indonesia dipahami dan diterapkan. Ketidakjelasan batasan inilah yang menyebabkan Al-Qiyadah, Lia Eden dan kelompok minoritas lainnya berada dalam posisi terpojok dan cenderung tertekan. Memang, kita tidak harus secara mutlak mengikuti pandangan liberalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi tiap individu dalam meyakini dan mengekspresikan imannya. Namun

paling tidak dalam masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, komunitas minoritas, apapun alasannya, harus dihormati hak-hak sipilnya, tanpa dipaksa untuk mengikuti “keinginan” kelompok yang berkuasa atau mayoritas.

Sebaliknya masyarakat minoritas juga hendaknya dapat menghargai dan menghormati kelompok lain terutama dengan tidak memancing terjadinya perilaku agresif dari kelompok tertentu seperti melalui kegiatan dan pernyataan yang dapat menyinggung dan melecehkan keyakinan orang lain. Yang pasti, tidak ada otoritas mutlak bagi siapapun, karena setiap orang pada dasarnya merupakan mayoritas dalam hal tertentu dan menjadi minoritas dalam hal lain. Dalam hal ini mayoritas Muslim (Sunni) bisa saja merasa memiliki hak yang lebih besar ketimbang yang lain karena populasinya yang besar. Namun masyarakat minoritas juga membutuhkan ruang dan kesempatan dalam mengekspresikan keyakinan mereka sehingga yang muncul seharusnya sikap saling menghargai dan saling membutuhkan satu sama lain.

Upaya mewujudkan masyarakat yang elegan dan rukun tidak mungkin terwujud tanpa kerja bersama setiap komponen bangsa termasuk pemerintah yang dapat menjadi fasilitator bagi

lahirnya masyarakat idaman. Melalui konstitusi yang baik, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Setiap warga negara, apapun kedudukannya berhak mendapatkan kebebasan dalam menyakini suatu paham keagamaan dan negara juga berkewajiban melindungi warganya dari ancaman kekerasan dari suatu kelompok tertentu. Tanpa konstitusi dan institusi yang kuat, maka perlindungan bagi warga negara hanya tinggal mimpi yang tak pernah menjadi kenyataan.

## **6. Nestapa Ahmadiyah dan Problematika HAM**

Jemaat Ahmadiyah merupakan kelompok minoritas yang terhimpit diantara dua kepentingan dari dua elite yang berpengaruh, elite negara dan elite agama. Elite negara cenderung membiarkan dan berupaya menjaga jarak dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elite agama. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak ingin dicap sebagai pelanggar hak-hak asasi manusia (HAM) jika melakukan pembredelan terhadap organisasi-organisasi keagamaan manapun. Landasan hukumnya jelas, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang

Maha Esa dan Negara memberikan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk dan menjalankan keyakinan yang dianutnya.

Sementara elite agama merasa diberikan kebebasan mengeluarkan aspirasi yang disengaja atau tidak telah menciptakan ketidakadilan dan perilaku kekerasan umat mayoritas kepada minoritas. Perkembangan aktifitas keagamaan umat beragama dewasa ini memang menampakkan perubahan. Di satu sisi peningkatan aktifitas ormas-ormas keagamaan memperlihatkan kegairahan yang patut diapresiasi dengan sungguh-sungguh. Namun pada sisi lain kita menyaksikan seolah-olah aktifitas dan misi keagamaan tampaknya lebih menjurus pada upaya peningkatan kepentingan sempit yang bertujuan memperkuat basis otoritas dan kekuasaan baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Sampai saat ini Ahmadiyah tidak diakui eksistensinya oleh komunitas elite keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi keagamaan Islam lainnya, padahal pemerintah sendiri tidak (belum?) membubarkan organisasi keagamaan ini, kecuali pelarangan penyebaran dakwah di masyarakat luas dan hanya untuk kalangan sendiri.

Baik negara maupun masyarakat sudah saatnya belajar bagaimana menghargai hak-hak asasi manusia. Tidak terkecuali lembaga-lembaga keagamaan baik mayoritas atau minoritas agar lebih membuka diri dari segala bentuk perbedaan dan tidak mengedepankan primordialisme. Sikap merasa kelompoknya yang paling benar dari kelompok lain cenderung akan melemahkan agama sebagai unsur “*civil society*” (Adeney, Civil Society, 2000). Indonesia boleh saja terkenal dengan asas musyawarah dan mufakatnya, namun memberikan sikap “*tasammub*” atau toleransi atas perbedaan pendapat tidaklah mudah ditemukan. Menurut John Rawls dalam “A Theory of Justice” (1971), setiap warga negara juga berhak mendapatkan kesempatan secara adil dan sama dalam mengembangkan dan menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Pertanyaan kemudian, darimana dan siapakah yang seharusnya memulai menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia? Sepertinya pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Masing-masing pihak memiliki argumen untuk saling berlingung, membela diri bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain.

Rakyat atau warga negara sudah barang tentu akan menisbatkan atau melimpahkan tanggung jawab menjalankan hak-hak asasi manusia kepada negara. Sebagai pemegang kekuasaan negeri, pemerintah sudah seharusnya mengganti kebijakan-kebijakan yang selama ini sangat otoriter dan keorsif dengan yang lebih demokratis. Sangatlah naif mengharapkan tegaknya demokrasi dan HAM jika negara yang notabene menjadi acuan dan pengambil kebijakan justru tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang penghargaan pada HAM.

Bernard Adeney Risakotta (1998) menggambarkan pentingnya pemerintah dalam memberikan teladan kepada masyarakat tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia melalui sebuah kisah tentang harimau dan ayam. Ringkasnya, harimau membujuk ayam untuk turun dari tumpukan beras yang tinggi dan merayunya dengan mengisahkan bahwa saat ini telah ada Hak Asasi Binatang yang memberikan perlindungan bagi hewa-hewan termasuk ayam. Masalahnya ayam masih ragu dengan kata manis harimau dan merasa ini sebagai tipuan karena harimau yang dikenal ayam adalah pemangsa ayam yang paling hebat. Sehingga ayam

mempertanyakan apakah mungkin harimau mau menghargai ayam dengan tidak menangkap dan memakannya, sementara harimau tampak masih mengeluarkan liurnya ketika melihat kemontokan ayam. Apa yang terjadi di negeri kita adalah, masyarakat sesungguhnya masih gamang dan apatis dengan konsep HAM karena selama beberapa dekade pemerintahan Indonesia, yang selalu terjadi adalah pelanggaran dan pelecehan terhadap hak-hak asasi warga negara, baik oleh negara kepada rakyat, maupun antar sesama warga negara.

Namun demikian bukanlah berarti HAM sama sekali tidak dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masyarakat kita, dalam kenyataannya telah lebih berkesinambungan dalam menjalankan HAM. Bagaimana seorang suami dapat menghormati istri dan hak-hak anak, pengendara mobil yang menghargai hak-hak pejalan kaki, dan cerita-cerita lain yang mencerminkan eksisnya kesadaran akan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran HAM dalam fakta-fakta sosial dapat memacu negara dalam meningkatkan peduli HAM secara universal. Meminjam istilah Michael Walzer (1994) tentang istilah etika “tebal/ *thick*” dan “tipis/ *thin*”, maka upaya menegakkan HAM lebih memungkinkan diterapkan



dalam wilayah riil atau konteks nyata (tebal) ketimbang memulainya dari prinsip-prinsip universal dan mutlak (tipis). Yang dibutuhkan disini bukanlah catatan-catatan tentang Hak Kebebasan Beragama, seperti yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Tapi suatu sikap, perilaku dan mentalitas yang memandang bahwa kebebasan beragama merupakan pandangan hidup yang harus terejawantahkan, tanpa rasa cemburu, curiga dan penuh penghormatan (Amin Abdullah, Kebebasan Beragama, 1998)

Mengacu pada kasus Ahmadiyah, maka perjuangan yang dilakukan jemaat Ahmadiyah untuk mempertahankan eksistensi dan hak-hak asasinya merupakan sikap wajar yang patut dihargai. Alih-alih melawan pemerintah atau membalas intimidasi dan teror yang mereka terima dari masyarakat dengan perlakuan yang sama, jemaat Ahmadiyah malah memilih jalan damai dan produktif sehingga dapat memberikan pelajaran bagi demokrasi di Indonesia.

Masyarakat muslim mayoritas sah-sah saja membela diri bahwa mereka juga memiliki HAM yang harus dihormati minoritas seperti Ahmadiyah, namun bukan berarti benturan antar HAM ini harus berakhir dengan kekerasan, karena hanya

akan melahirkan permasalahan HAM baru. Institusi pemerintah seharusnya lebih jelas dan tegas dalam menetapkan batasanbatasan HAM dan menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Termasuk memberikan perlakuan yang adil yaitu dengan menetapkan aturan yang sama bagi setiap pelaku kekerasan dan tindakan tidak menyenangkan agar ditindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Tanpa konstitusi dan institusi yang kredibel, maka perlindungan bagi warga negara hanya angan kosong belaka.

## **7. Dakwah-Misi Vis à Vis Kebebasan Beragama**

Kompleksitas persoalan dakwah (Islam) dan misi (Kristen) di Indonesia terutama di Kalimantan Barat terus mengalami dinamika intensitas di tengah pergaulan antar umat beragama. Dalam hal ini kehidupan beragama menghadapi sebuah tantangan besar, yaitu bagaimana umat beragama mampu mendefinisikan dirinya secara tepat di tengah eksistensi agama lain?. Kompleksitas ini berawal dari sebuah pertanyaan mendasar; Apa sebenarnya hakikat Dakwah dalam Islam dan Misi dalam Kristen?. Disatu sisi melakukan dakwah-misi

merupakan kebebasan dalam memanifestasikan keyakinan, namun disisi lain kegiatan ini sering menimbulkan kecurigaan yang menjurus pada ketegangan, lalu bagaimana misi-dakwah (baik internal maupun eksternal) ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan ketegangan antar pemeluk agama?

Prof. Olaf Schuman dalam suatu seminar di Center for Religious and Cross Cultural Studies (Prodi Ilmu Perbandingan Agama) UGM memberikan analisis yang cukup representatif tentang Misi dan Dialog di kalangan umat Muslim dan Kristen, dimana Schuman menggambarkan dengan baik problematika di seputar Misi dan Dakwah yang akhir-akhir ini kembali menghangat di Indonesia. Menurutnya, kita perlu mengakui bahwa misi dan dakwah merupakan kewajiban religius yang hakiki baik dalam agama Kristen maupun dalam agama Islam. Karena itu orang Kristen dan orang Islam mau tidak mau harus berbicara bersama tentang misi-dakwah dan tentang akibat-akibat dari kenyataan itu untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam pemahaman yang mendasar, masih menurut penjelasan Olaf Schuman, misi Kristen diartikan sebagai penerimaan dan pelanjutan misi Allah yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus dan yang melahirkan perkumpulan

orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang melanjutkan misi Yesus Kristus dalam gereja yang didirikan oleh kuasa Yesus Kristus. Tugas dari anggotanya adalah membawa misi Yesus Kristus keluar ke dunia. Sementara itu dakwah diartikan panggilan atau undangan, maksudnya undangan untuk mengikuti jalan yang lurus/ benar (*shirath al mustaqim*), di mana Allah swt menuntun manusia melalui utusan-utusannya. Sama dengan umat Kristen dalam mengartikan misi, pada tingkat tertentu, dakwah juga sering dimaksudkan orang Muslim untuk mengundang orang di luar kelompoknya untuk ikut masuk dalam lingkaran internal jalan lurus tersebut (Jiahjim, *crcs\_mailinglist*, 2007).

Saat ini, dalam kajian teologis telah muncul transformasi pengertian dakwah-misi yang lebih terbuka, tidak selalu diartikan untuk mengajak orang di luar kelompok bersangkutan untuk masuk ke lingkaran internal kelompoknya. Berkaitan berhubungan dengan kelompok di luarnya, dakwah-misi sekarang juga dimengerti sebagai sebuah proses interaksi untuk saling memperkuat keyakinan masing-masing yang kemudian diarahkan untuk menyelesaikan problem-problem sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Kerjasama agama-agama untuk

menanggulangi krisis lingkungan dan “*global warming*” bisa menjadi contoh yang baik. Namun, tidak otomatis kemudian semua umat beriman, terutama tokoh-tokohnya, meninggalkan pengertian dakwah-misi yang awal yang lebih bersifat ofensif dan sekaligus defensif, menyerang maupun mempertahankan diri dari serangan agama lain.

Karena itu, pada tingkat tertentu dalam situasi kehidupan bersama antara orang Kristen dan Islam, dakwah-misi dalam bentuk awal tersebut rupa-rupanya tidak dapat begitu saja diabaikan, termasuk bagi orang-orang yang telah tertransformasi. Oleh sebab itu, mengenali hakikat misi-dakwah dan menarik konsekuensi- konsekuensi yang cocok untuk dipraktikkan bersama tetap dibutuhkan dalam hidup sosial bersama.

Satu contoh terhangat tentang persinggungan dakwahmisi baru saja terjadi di Yogyakarta akhir bulan Mei 2007 kemarin. Salah satu bagian dari umat Kristen di Yogyakarta merencanakan Jogja Festival 2007 yang kurang lebih berintikan "misi" pengobatan yang akan dipimpin oleh Pendeta Peter Youngren dari Kanada. Jauh hari

sebelumnya, panitia memasang iklan besar dan selebaran di mana-mana. Tak lama setelah itu, baliho besar yang terpasang di pojok kota menjadi sasaran kritik grafiti dari kelompok agama lain yang menentangnya. Selebaran tandingan juga bermunculan, bersifat mengingatkan umat Muslim untuk tidak hadir, bahkan juga berupa ancaman. Sehari sebelum acara itu rencananya digelar, gerakan yang dikonsolidir oleh kelompokkelompok tertentu mendesak Kepolisian untuk membatalkan acara tersebut. Kemudian pada hari itu juga Kepolisian

Yogyakarta mencabut izin penyelenggaraan acara tersebut. Sempat muncul ketegangan, tapi kearifan semua yang terlibat dalam peristiwa ini membuat tidak munculnya kekerasan.

Paparan tersebut hanya satu contoh riil dari sekian peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pada tingkat tertentu, ketegangan tidak saja selalu disulut oleh misi Kristen, tapi juga dakwah Islam di tempat-tempat dimana umat Kristen mayoritas. Lebih lanjut, di Bali misalnya, ketegangan tidak selalu memperhadapkan Islam-Kristen, tapi antara Hindu sebagai umat mayoritas dengan salah satu agama atau lebih di luarnya.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebaiknya hubungan antara mayoritas dan minoritas agar tidak terjadi diskriminasi dan represi terutama terhadap minoritas? Disinilah pentingnya kode etik tertentu yang perlu digagas bersama sebagai kesepakatan bersama antar umat beragama. Mengenai bagaimana format dan dasar etika yang bisa dikembangkan, saat ini telah banyak wadah yang dapat digunakan untuk membangun kesepakatan bersama. Sebut saja misalnya melalui Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB) baik yang ada di pusat, wilayah sampai daerah sudah seharusnya diberdayakan agar elemen masyarakat multi agama dapat merumuskan langkah-langkah dan kebijakan strategis sehingga persoalan keberagamaan di masyarakat dapat diatur dan dikendalikan.

Misalnya bagaimana membangun kesepakatan tentang pendirian rumah ibadah, pendidikan agama pada sekolah swasta (agama), dakwah pada umat yang telah beragama, termasuk merumuskan dialog keseharian, dialog sosial, dialog ritual bersama, dialog teologis, dialog komunikasi pengalaman beragama dan lain-lain. Dengan demikian keberagamaan menjadi “saling menyapa” dan masyarakat dapat hidup

berdampingan tanpa menyimpan kebencian dan kekhawatiran yang tidak semestinya terjadi.

Dan yang tidak kalah pentingnya Negara tidak perlu terlampau jauh mengurus praktek keyakinan masyarakat, kecuali sebatas mengontrol dan memfasilitasi seluruh kebutuhan keagamaan umat. Saat ini apresiasi pemerintah terhadap kebebasan agama tampak sudah cukup menggembirakan walaupun belum maksimal, misalnya dengan memberikan kebebasan bagi umat Khonghucu menjalankan ibadah dan mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai umat beragama seperti mendapatkan layanan pencatatan perkawinan, akta kelahiran, pendidikan agama Khonghucu, pendirian rumah ibadah dan pencantuman agama di KTP. Berbeda dengan agama Khonghucu yang bukan “Agama Misi”, maka kompleksitas persoalan dan tanggungjawab agama-agama misi seharusnya dapat lebih diantisipasi dan digarap secara sungguh-sungguh dalam rangka melestarikan budaya harmoni dalam bingkai spirit kebebasan beragama.

Kebebasan beragama sebenarnya merupakan hal yang tidak asing bagi bangsa Indonesia, karena faktor sejarah panjang kebangsaan ini. Di sisi lain Konstitusi tertinggi bangsa ini,



misalnya UUD 1945 pasal 28 dan 29, juga telah "mematri" kebebasan beragama sebagai salah satu visi dasar bangsa ini. Misi-dakwah yang cukup rumit dan kompleks pada saat bersamaan seharusnya juga dibingkai dalam spirit kebebasan beragama. Memang tidak mudah, tapi kita harus berhasil merumuskan dasar-dasar nilai etis bersama untuk menyongsong masyarakat yang semakin plural.

## **8. Memahami Dialektika Agama dan Budaya**

Bangsa kita sering mengalami semacam dialektika antara agama dan budaya. Dalam hal ini agama ditempatkan dalam posisi superordinat atas kebudayaan, atau sebaliknya menempatkan agama sebagai bagian dari kebudayaan. Pada resistensi pertama, orang akan mengalami kesulitan untuk menerima hal-hal yang dianggap bukan berasal dari agama. Pada sisi yang lain, orang akan kesulitan memahami perilaku yang dianggap tidak rasional atau berlebihan.

Dialektika muncul seperti dalam ranah seni dan estetika, bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan, sikap

terhadap korban HIV/AIDS, termasuk budaya konflik dan kekerasan yang berasal dari dan atau mengatasnamakan agama.. Faktanya, fenomena 'ketegangan' antara agama dan budaya ini selalu mencuat di tengah lajunya globalisasi dan tentu saja hal ini sangat kontras dengan pandangan yang menganggap agama berfungsi sebagai perekat damai dalam kebudayaan.

Fenomena tersebut menjadi problem mendasar yang dihadapi masyarakat cendikia dan agamawan saat ini, tatkala agama mengalami krisis dalam dirinya sendiri, dimana agama hadir hanya sebagai dogma dan dokumentasi ritual belaka. Sehingga, agama tidak mampu berinteraksi dengan dinamika sosial-masyarakat yang sedang mengalami krisis multidimensional. Konsekuensinya, agama tak mampu memberikan solusi alternatif bagi penyelesaian problem kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan pemaknaan agama yang lebih dinamis, yang hidup ditengah obyektif komunitas manusia yang secara signifikan akan mempengaruhi timbulnya interpretasi maupun aktualisasi manusia-manusia pemeluknya.

Kebudayaan dan agama sudah menjadi sifat manusiawi. Agama memberikan pandangan tentang dunia pada umumnya, seperti visi tentang dunia, pandangan moral dan tingkah laku,

ritual dan lain-lain. Agama memberi pengaruh yang kuat terhadap kenyataan masyarakat, sehingga dalam berbagai aspek, agama merupakan bagian dari satu kebudayaan dan berhubungan erat dengan semua bagian lain dari kebudayaan (Muda, 1992).

Clifford Geertz dalam bukunya *The Interpretation of Cultures* (1973) melihat agama sebagai keyakinan-keyakinan keagamaan yang hidup dalam diri para penganutnya dan yang terwujud dalam kompleksitas kehidupan mereka sehari-hari. Yaitu kehidupan sehari-hari, baik yang sakral maupun yang profan. Sedangkan yang kudus itu ada dalam teks-teks suci agama yang melalui proses-proses interpretasi untuk pemahaman dijadikan acuan atau pedoman bagi keyakinan-keyakinan keagamaan dalam kehidupan penganutnya sehari-hari. Dalam keadaan demikian keyakinan-keyakinan keagamaan yang hidup dalam diri para penganutnya adalah sama dengan kebudayaan dari para penganut keagamaan tersebut, dan sebaliknya, kebudayaan tersebut bagi para penganutnya adalah sesuatu yang sakral dan karena itu bercorak keagamaan.

Sementara konsep kebudayaan atau sistem budaya selalu dihubungkan dengan suatu pola atau sistem makna. Dan

sistem makna tersebut selalu memiliki dua penekanan; kognitif dan evaluatif. Jika yang menjadi penekanan adalah sisi kognitifnya kebudayaan, maka yang kita temukan adalah sistem kepercayaan, atau pengetahuan yang memungkinkan pemilik sebuah kebudayaan mengetahui dunianya, masyarakatnya, bahkan dirinya sendiri dengan cara tertentu. Sebaliknya penekanan pada sisi evaluatif, suatu pengetahuan dan kepercayaan tertentu ditransformasikan menjadi nilai-nilai. Dengan demikian, setiap sistem budaya selalu menetapkan etos tertentu bagi pendukungnya, baik yang berhubungan dengan nilai-nilai moral maupun estetika (Kleden, 1987:9-10).

Yang jelas kebudayaan merupakan suatu proses, dan bukan suatu akhir, sehingga akan selalu tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Umar Kayam (1986), kebudayaan dipahami sebagai “proses upaya masyarakat yang dialektis dalam menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapkan kepadanya”. Untuk itu konsep perantara perlu digunakan, yaitu dengan melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan yang diyakini kebenarannya oleh para penganutnya untuk memahami lingkungannya guna memanfaatkannya bagi

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupannya (Spradley 1972:6).

Sebagai pedoman bagi kehidupan, kebudayaan berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, termasuk keyakinankeyakinan keagamaan. Keyakinan-keyakinan yang menjadi patokan penilaian secara etika, moral, dan adab bagi tindakantindakan para penganutnya dalam pemenuhan kebutuhankebutuhan hidupnya sebagai manusia. Keyakinan-keyakinan keagamaan yang menjadi patokan-patokan tersebut, menjadi membumi atau menjadi nilai-nilai budaya bagi penganutnya dan “menjauh” dari teks-teks suci karena yang bermakna adalah interpretasi dan hasil interpretasi dan bukan teks suci tersebut sebagai “teks suci”.

Dalam keadaan demikian itulah agama sebagai keyakinan keagamaan, menjadi kebudayaan atau lebih tepatnya menjadi nilai budaya. Dengan kata lain, di mana kebudayaan yang berintikan nilai-nilai budaya yang juga adalah keyakinankeyakinan keagamaan, maka kebudayaan menjadi sakral bagi para penganutnya. Jadi gerakan kebudayaan hanya akan mampu bertahan jika mendapat dukungan dari kekuatan transenden agama yang idealnya berada di atas pluralitas budaya

dan bangsa, dan sebaliknya gerakan agama yang tidak lain merupakan gerakan kebudayaan karena perwujudan akhir dan perilaku kita tampil dalam ranah budaya, harus mampu berperan atau mengartikulasikan diri dalam wadah budaya yang ber-misi emansipatoris dan perdamaian sebagai suatu sinergitas yang saling menguatkan.

Dengan demikian dialektika agama dan budaya seharusnya tidak perlu mengalami ketegangan karena adanya tarik menarik kepentingan (memihak) dan kecenderungan

(memilih); apakah ini urusan agama, atau urusan budaya?. Namun keduanya dapat bersinergi – sesuai dengan pemahaman yang utuh mengenai agama dan budaya – baik dalam bentuk “agama yang berwawasan budaya” atau “budaya yang bernafaskan agama”, sehingga keduanya dapat berperan secara integratif, apresiatif dan akomodatif terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Agama memang bukan sesuatu yang otonom, berada dalam ruang hampa yang bebas nilai. Agama pada akhirnya tetap berada di tengah realitas obyektif komunitas manusia yang secara signifikan akan mempengaruhi timbulnya interpretasi maupun aktualisasi manusia-manusia pemeluknya. Jadi, agar

fungsi kemanusiaan agama dapat tercapai, yakni menjadi rahmat bagi semesta alam, maka pemahaman peran agama yang bersifat a politis atau terbatas pada lingkup ritualistik harus dilebarkan pada keterlibatan agama secara proaktif ke dalam misi pemberdayaan dan transformasi sosial budaya, sehingga berbagai persoalan yang menyangkut problem kehidupan yang membutuhkan peran aktif agama dapat teratasi dengan baik.

## **9. Politik dan Primordialisme Etno-Religius**

Sejarah kekalahan partai politik yang berorientasi agama terhadap partai berorientasi nasionalis atau sekuler hampir di setiap pemilihan umum sejak tahun 1955 sampai 2014, ternyata tidak membuat jera para petualang politik untuk menggunakan identitas dan simbol agama dan etnik sebagai daya tarik bagi keberhasilan tujuan politiknya. Hal ini karena simbol dan identitas etnik dan agama sampai kapanpun tidak akan pernah terbebas dari praktek politik kekuasaan dan tetap akan diminati oleh masyarakat yang memang mudah tersentuh primordialismenya terutama karena persoalan etnik dan agama.

Namun sejarah juga membuktikan bahwa penggunaan simbol dan identitas etnik atau agama dalam politik selalu tidak efektif bahkan lebih sering mengalami kegagalan karena kecenderungan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk karena faktor manipulasi politik dengan segala bentuknya yang bisa membuat setiap orang bisa merubah pilihan politiknya hanya karena sekarung beras atau beberapa lembar rupiah.

Dan tampaknya budaya primordialisme etno-religius ini turut memperhangat suasana pemilihan gubernur di Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang lalu, dan pernyataan komponen masyarakat dan elite politik di tingkat propinsi beberapa waktu lalu yang menyarankan agar kandidat gubernur sebaiknya cukup 2 (dua) pasang saja bisa dipastikan adalah karena faktor primordialisme ini. Memang sah-sah saja jika isu ini dijadikan sebagai cara mencapai tujuan politik, sebab dalam alam demokrasi siapapun berhak menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani dan kepentingannya masing-masing, namun membatasi jumlah kandidat yang akan bertarung memperebutkan jabatan tertinggi di propinsi ini adalah bagian kontradiksi dari esensi demokrasi itu sendiri.



Persoalannya kemudian, apakah ada jaminan bahwa mereka yang kita dukung atau calon pemimpin yang menggunakan sentimen etnik dan agama mampu menjamin bahwa mereka akan memberikan “ganti” yang proporsional atas dukungan yang kita berikan, terutama bagi kepentingan etnik dan agama itu sendiri?. Sebab belum tentu mereka yang beretnik A atau beragama A merupakan representasi atau citra ideal dari etnik dan agama A itu sendiri. Dan bukanlah hal asing jika simbol-simbol dan identitas seperti agama dan etnik terkadang hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan dan sapi perahan demi kepentingan yang terbatas, dan upaya bagi seseorang untuk mendapatkan atau memperkokoh kekuasaannya.

Di sisi lain harga yang harus dibayar dari penggunaan simbol dan identitas etnik dan agama terkadang sangat mahal. Tidak jarang politik primordialisme ini justru semakin memperkuat pembelahan masyarakat atau sektarianisme dan etno-regiosentrisme yang cenderung kontraproduktif bagi keberlangsungan bangsa yang multiidentitas ini.

Belum lagi bagaimana pertarungan pilkada di tingkat bawah sebagai pihak yang paling merasakan “panasnya” euphoria pilkada, yang dapat dengan mudah termakan isu atau

terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat memicu ketegangan bahkan konflik hanya karena persoalan primordialisme tadi. Ironisme tidak sedikit cacat politik yang melahirkan konflik dan kekerasan ini mendapatkan legalitas atau pembenaran dari “kacamata buram” pesan-pesan atau elite keagamaan.

Artinya mengangkat isu etnik dan agama dalam politik bagaikan pedang bermata dua; di satu sisi isu politik seperti ini mampu memberikan penguatan etno-religiosentrisme yang dalam aspek tertentu dapat memperkuat semangat kedaerahan dan sentimen keagamaan, namun disisi lain tingginya rasa kesetiaan dan fanatisme kelompok dari tiap-tiap kelompok justru dapat menghidupkan bara atau potensi konflik yang dapat mengganggu ketenangan dan kerukunan masyarakat.

Sementara seorang pemimpin ideal seharusnya dapat berdiri di atas segala golongan baik etnik, agama dan seluruh kepentingan. Artinya pemimpin harus kosmopolit dan moderat; yang cinta pada etnik dan agamanya sendiri, tapi tidak lalu apriori dan akhirnya berlaku tidak adil pada pihak yang bukan golongannya. Memang mencari pemimpin yang seperti ini hampir merupakan sesuatu yang sangat langka untuk saat ini.

Namun paling tidak kita dapat memutuskan untuk memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik, atau bahkan ketika dihadapkan kepada pemimpin yang sama jeleknya pun, sebaiknya kita tetap memilih alternatif yang paling sedikit kerugian atau resistensinya jika tidak dijumpai alternatif pemimpin yang lebih baik lagi.

Hal ini berarti bahwa memilih pemimpin tidak mesti karena dia beretnik dan beragama yang sama dengan kita, tapi karena jiwa kepemimpinannya dan potensi yang layak menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Disamping itu pemimpin harus memiliki “track record” yang baik seperti fisik, mental atau kepribadiannya, pengalaman kepemimpinannya, termasuk harta kekayaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya seorang pemimpin harus berjiwa toleran dan adil. Berhubung masyarakat Kalimantan Barat cukup religius dan multikultural, maka pemimpin daerah ini harus mampu menjadi pengayom bagi seluruh warganya. Pemimpin juga harus mampu menjadi mediator dan memberikan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terutama yang berhubungan dengan dinamika etnik dan agama. Jiwa toleran dari calon seorang pemimpin paling tidak dapat dibuktikan dari kesediaannya untuk

mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang beragam dengan asas keadilan dan kebijaksanaan.

Negeri kita membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan bangsa, lintas etnik, lintas agama dan golongan. Jadi jika saat pilgub ada kandidat pemimpin yang hanya menonjolkan kepentingan etnik dan agamanya saja, maka bisa dipastikan saat menjabat nanti semangat kepemimpinannya pun akan sektarian dan sarat dengan ketidakadilan.

Untuk itu biarlah agama dan etnik tetap menjadi sumber nilai dan identitas budaya yang kokoh tanpa harus dijadikan “dagangan” politik yang cenderung memperkedil otoritas agama atau etnik itu sendiri. Memang dalam persoalan representasi, maka wajar-wajar saja di alam demokrasi ada kelompok agama atau etnik yang memainkan perannya dalam rangka mendukung salah satu calon pemimpin mereka, selama hal itu tidak mengarah kepada sebuah polarisasi yang berimplikasi pada patahnya bingkai harmoni antar etnik dan agama yang ada.

Begitupun bagi para kandidat yang dengan sengaja menggandeng tokoh, kelompok, organisasi dan atau memanfaatkan isu-isu agama atau etnik sebagai alat dan basis

kekuatan politiknya, maka sudah seharusnya tidak berhenti pada kepentingan dan representasi yang sempit, tapi hendaknya memihak pada kepentingan bersama demi kesejahteraan dan keharmonisan bersama.

Akhirnya dalam kontestasi baik pilpres, pilgub atau pileg, biarkan para kandidat bertarung secara sehat dan elegan, tanpa membatasi berapapun jumlahnya, dan tanpa harus menghadapadapatkan etnik atau agama satu dengan yang lain, karena jaminan kesuksesan seorang pemimpin lebih mudah diukur dari kemampuannya “bersahabat” dengan perbedaan dan bukannya menciptakan sekat-sekat primordialisme yang belum tentu sesuai harapan.

## **10. Korupsi dalam Budaya Moral**

Saat ini korupsi bukan hanya sekedar gejala, melainkan telah menjadi budaya. Secara hakiki korupsi adalah suatu bentuk kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Sebagai kekerasan struktural, korupsi didukung dan dihidupi oleh strukturstruktur hubungan antar manusia yang bersifat tidak adil, menindas yang lemah, menguntungkan elite, yang terejawantahkan dalam

hubungan politik, birokrat dan sipil yang ditandai dengan penindasan birokrasi, mengatasnamakan hukum, dan memiliki kekuasaan terhadap non birokrat yang tidak memiliki kekuasaan. Celakanya, struktur hubungan ini menjadi semacam lingkaran setan yang terjadi mulai tataran terendah di pedesaan sampai ditingkat pemerintahan pusat.

Sebagai kekerasan budaya, korupsi didukung oleh anggapan kuat dan mendalam bahwa melakukan korupsi itu normal, wajar, tidak apa-apa dan sah-sah saja. Taktik normalisasi ini, menurut Michel Foucault dalam “Beyond

Structuralism and Hermeneutics” (1983) merupakan “strategi politik” yang dipakai untuk melakukan pemisahan, normalisasi dan institusionalisasi populasi dalam rangka menemukan kemapanan dan keamanan di ruang-ruang sosial. Dengan memahami korupsi sebagai bentuk kekerasan struktural dan budaya yang didukung dan dihidupi oleh struktur dan budaya yang mendalam, maka kita bisa menyadari betapa pemberantasan korupsi yang benar-benar bermakna niscaya mencakup “communicative action” dan perombakan struktur dan budaya mendalam yang mendukung serta menghidupinya.

Di samping itu, dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tidak hanya mengorupsi uang, tetapi lebih dari itu juga melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku

korupnya, sesungguhnya ia telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keseluruhan nilai-nilai moral dan hati nurani. Mustafa Ibn ‘Abdullah dalam bukunya “The Balance of Truth” (1957) menulis tentang korupsi kaitannya dengan moral. Ia mengikhtiarkan dan mengidentifikasi tentang boleh tidaknya perbuatan penyuapan dalam perspektif moral.

Pertama, penyuapan yang baik pihak pemberi maupun pihak penerimanya secara moral salah. Sebagai contoh, penyuapan kepada hakim agar mendapatkan vonis yang menguntungkan. Kedua, penyuapan yang boleh diberikan tetapi tidak boleh diterima. Bila seseorang penguasa yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya. Ketiga, penyuapan yang pihak pemberinya bersalah sedang penerimanya tidak bersalah. Ini adalah korupsi investif yang direncanakan oleh pihak pemberi dengan tujuan yang korup.

Di sisi lain, korupsi yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan pelaku yang luas hanya bisa ditanggulangi dengan pendekatan komprehensif, strategis, massif, baik secara struktural maupun kultural. Pendekatan struktural diarahkan

pada penguatan isu-isu korupsi yang berkaitan dengan lembaga publik, sedangkan pendekatan kultural diarahkan pada usaha membangun kesadaran publik untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Pendekatan struktural dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat dengan pendekatan yurisdiksi dan advokasi. Sedangkan penguatan pada basis kultural lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, pendidikan, agama dan lain-lain.

Basis kultural lembaga-lembaga dari berbagai agama di Indonesia misalnya, dituntut untuk melakukan “moral force” dengan mengupas aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi, bagaimana korupsi dalam tinjauan moral atau akhlak dan lain-lain. Menurut Waryani F. Riyanto dalam “Korupsi dan Budaya” (2006), setidaknya ada enam standarisasi moral keagamaan yang terkait dengan upaya penyadaran terhadap tindakan korupsi, yaitu: hati nurani (qalb salim), kejujuran (as-sidq), harta (al-maal), tanggungjawab (alamanah), etos kerja (al-kasb), dan keadilan (al-‘adl).

Hati adalah tempat bersemayam iman. Imanlah yang menyinari hati sehingga dia bercahaya. Hati nuranilah yang berfungsi mengontrol secara internal pikiran, perkataan dan perbuatan.



Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kontrol tersebut dari segala kemungkarannya atau kekufuran, termasuk korupsi, sangat penting sekali usaha-usaha peningkatan iman. Dalam istilah Yunani seperti yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu “syneidesis”, dimana hati nurani merupakan suatu kesadaran dalam diri manusia tentang apa yang baik dan apa yang jahat, kesadaran diri yang mempersalahkan dan membenarkan perbuatan yang sudah dan sedang dilakukan (Roma 7:7-26).

Kejujuran adalah lawan dari sifat bohong atau dusta. Jika perbuatan korupsi diidentikkan dengan perbuatan bohong atau menipu, maka tentunya sifat-sifat yang akan nampak dalam dirinya adalah: ingkar janji, khianat, penuh kepalsuan dan suka memfitnah. Dalam Kitab agama Khonghucu dikatakan: “Nabi Khongcu bersabda: Angkatlah orang yang lurus (jujur) di atas orang-orang yang bengkok, dengan demikian dapat mengubah yang bengkok menjadi lurus. (Sabda Suci XII:22)”, sementara dalam Weda, ketidakjujuran berlawanan dengan konsep satya (tidak berkata bohong) (Samuccaya 19:259).

Dalam menanamkan kesadaran untuk bertanggungjawab dan tidak korupsi, konsep amanah dalam Islam dibagi dalam tiga kategori yaitu: memelihara titipan (an-Nisa 4:58), menunaikan

kewajiban dengan baik (al-Ahzab 33:72) dan tidak menyalahgunakan jabatan (Hadits). Dalam Bhagawad Gita, konsep amanah terdapat dalam ajaran untuk melaksanakan seluruh kerja sebagai suatu kewajiban tanpa harapan keuntungan pribadi, akan membawa orang ke kebahagiaan tertinggi (Bhagawad Gita III.19).

Sementara harta dalam Islam tidak hanya mempunyai fungsi individu, namun juga fungsi sosial. Untuk para pelaku korupsi harta (uang), setidaknya harus menyadari akan beberapa peringatan al-Quran tentang harta yaitu: harta berpotensi melalaikan, dan harta tidak akan dapat memberikan pertolongan apapun di akhirat. Yesus juga berkata: “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa.” (Mat 16:26). Dalam Islam, kerja adalah ibadah, dan tidak ada ibadah yang dilakukan dengan cara mungkar. Misalnya jika harta yang disadaqahkan berasal dari hasil korupsi, maka hukumnya samasama haram. Jika perbuatan korupsi dikatakan sebagai memutuskan sesuatu tidak dengan sepatutnya, maka tentu perbuatan itu bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam.

Selain penguatan pada basis struktural dan kultural baik oleh lembaga politik maupun kemasyarakatan, maka

perombakan struktur dan budaya mendalam menuntut aksi nyata atau operasionalisasi dari beberapa upaya besar baik melalui program-program pemerintah (struktur politik), maupun masyarakat dan institusi keagamaan (kultur budaya): Pertama, upaya serius dalam mengelola setiap keperluan kemanusiaan bagi setiap warga yang berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali. Kedua, kampanye besar dan terus menerus dan penindakan tegas, tata asas, berkesinambungan terhadap koruptor tanpa pandang bulu, demi mewartakan kepada setiap warga Indonesia, bahwa korupsi itu abnormal, tidak wajar, jahat, buruk, tidak pernah bisa dibenarkan dan memalukan.

Ketiga, mengejawantahkan kesetaraan dalam relasi birokrat yang memiliki kekuasaan dengan non-birokrat, demi merombak struktur mendalam yang selama ini mengatur hubungan-hubungan yang tidak adil dan menindas. Keempat, perlunya pemberlakuan kurikulum antikorupsi mulai dari lingkungan sekolah sampai perguruan tinggi, yang memiliki visi pembelajaran antikorupsi yaitu mencetak generasi intelektual dan ideologi yang berkualitas, bermoral dan bermental antikorupsi. Sedangkan misinya adalah melahirkan generasi

populis yang mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.

## **11. Pesan Multikulturalisme Cap Go Meh Singkawang**

Kota Singkawang saat ini layak dijadikan rujukan dalam pembelajaran multikulturalisme bagi daerah lain di Indonesia. Dalam pernyataan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa festival Cap Go Meh di Singkawang pada tahun 2019 akan dilaksanakan dengan lebih meriah dan semarak dibandingkan perayaan tahun sebelumnya.

Meskipun kota ini beberapa dipimpin oleh tokoh yang berbeda etnik dan agama, namun semangat multikulturalisme yang ingin dikembangkan telah melintasi batas-batas kesukuan dan agama sehingga kota Singkawang telah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap golongan untuk hidup berdampingan.

Multikulturalisme dalam hal ini dimaknai sebagai pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme budaya; multibudaya menjunjung tinggi dan berupaya melindungi keanekaragaman budaya, dan pada saat yang bersamaan menfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang seringkali tidak seimbang.

Dengan demikian penjabaran konsep multikulturalisme dapat dilihat dari tradisi Cap Go Meh dan ritual Tatung di Singkawang baik yang dikelola oleh pemerintah Kota Singkawang, maupun organisasi keagamaan Tionghoa seperti Keluarga Besar Majelis Tridharma dan Majelis Tao Indonesia resort Singkawang.

Sebagai salah satu ekspresi budaya dan agama, perayaan Cap Goh Meh dan ritual Tatung telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat non-Tionghoa di Kota Singkawang. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa dalam prosesi kegiatan Cap Go Meh itu juga dihadiri dan dilakoni oleh etnis Melayu dan Dayak. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi Cap Go Meh dan ritual Tatung tidak lagi menjadi milik etnis Tionghoa semata, tetapi telah menjadi sebuah “komunitas budaya” dari beberapa etnik lain seperti Dayak, Melayu dan etnik lainnya.

Meskipun sempat menuai pro dan kontra, beberapa kalangan dari masyarakat non-Tionghoa terutama dari kalangan *grass root* tidak memperlakukan perayaan Cap Go Meh dan ritual Tatung. Pembauran budaya tersebut lebih dipahami masyarakat sebagai partisipasi sosial kebudayaan dalam sebuah wilayah yang multi etnik. Hal ini terbukti dengan kehadiran dan partisipasi warga selain orang Tionghoa pada perayaan Cap Go Meh baik sebagai Tatung, pembawa tandu, pembawa barongsai, pengiring musik, penonton sampai pada penjual asesori khas etnik Tionghoa telah menjadi bukti penerimaan sebagian masyarakat non-Tionghoa pada tradisi tersebut.

Begitupun pada festival Cap Go Meh yang melibatkan sekian banyak unsur kebudayaan dan organisasi didalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir Panitia Cap Go Meh Singkawang mengundang beberapa organisasi budaya dari beberapa daerah di Indonesia seperti Madura, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan propinsi lain untuk menampilkan kebudayaan daerah mereka seperti reog Ponorogo, kuda lumping, padepokan budaya dan lain-lain yang semakin menambah semangat multikulturalisme festival tersebut.

Unsur-unsur multikulturalisme dari perayaan budaya ini dapat dilihat diberbagai aspek seperti; aspek keyakinan, aspek sikap terhadap yang ghaib dan aspek upacara. Pada sistem keyakinan, masyarakat tiga etnik utama, Tionghoa, Dayak dan Melayu memiliki sistem keyakinan yang berbeda terhadap sesuatu yang diyakini sebagai Yang Sakral. Perbedaan tersebut berasal dari sumber keyakinan agama formal yang dianut oleh ketiga etnik yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai etnik Tionghoa penganut Tri Dharma, etnik Dayak penganut Kristiani dan Melayu sebagai muslim. Namun, dalam sebuah ritual sakral Tatung, identitas agama formal para Tatung tertutup oleh semacam identitas “agama budaya” yang memiliki sistem keyakinan tertentu dan dipercaya serta dijalankan secara kolektif oleh para Tatung.

Pada sistem keyakinan Tatung, mereka memiliki keyakinan yang sama dengan adanya kekuatan dewa atau roh sebagai kekuatan penggerak dan pengatur alam kehidupan, sementara Tatung diyakini sebagai medium yang tepat bagi para dewa dan roh untuk menjalankan fungsinya kepada masyarakat. Dalam hal ini Tatung telah keluar dari batas-batas agama dan budaya mereka dan menyatu dalam sebuah komunitas dan kebudayaan yang baru.

Pada aspek sikap terhadap yang ghaib, tradisi agama formal yang dianut oleh para Tatung memiliki konsep yang sama dalam menghadapi yang ghaib. Ketiga tradisi agama menganggap yang ghaib sebagai sesuatu yang maha dahsyat dan keramat. Sementara, sifat dari yang maha dahsyat dan keramat adalah maha abadi, maha bijaksana, maha berkuasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut berada diluar jangkauan akal pikiran manusia, namun sifat tersebut menimbulkan rasa kagum, hormat, sehingga memunculkan hasrat untuk dirasakan dan dihayati.

Aspek sikap terhadap yang ghaib ini mendapat tempat dan kedudukan yang sama bagi para Tatung dalam memandang satu dengan yang lainnya. Meskipun bentuk dan simbol-simbol yang ghaib berbeda pada tiap tradisi agama, namun penghormatan para Tatung terhadap perbedaan tradisi tersebut terbentuk dalam sebuah keyakinan kolektif bahwa kekuatan yang ghaib, apa pun nama dan asal usulnya adalah sesuatu yang harus dihormati dan pada tiap Tatung, setiap mereka memiliki “pegangan” dan sumber kekuatan ghaib masing-masing. Pada aspek upacara, semangat multikulturalisme dalam masyarakat Tatung yang diayomi dan dibina dalam keluarga besar Majelis Tridharma dan Majelis Tao Indonesia Singkawang ini dapat dilihat dari kesadaran kolektif mereka yang menghargai upacara



atau ritual masing-masing agama. Misalnya pada memasuki waktu sholat, seluruh aktifitas ritual Tatung dihentikan guna menghormati umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Pada Tatung yang memiliki pasien muslim, meskipun Tatung menggunakan peran dewa atau roh, mereka tetap menganjurkan agar pasien tersebut selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak lupa melaksanakan ibadah agar diberi kemudahan. Mereka juga tidak mensyaratkan menggunakan, meminum atau memakan benda-benda atau sesuatu yang dinilai tidak diperbolehkan oleh agama-agama tertentu.

Lebih jauh, meskipun keyakinan dan norma-norma yang berlaku ditiap agama bisa berbeda-beda, namun kepercayaan terhadap pentingnya sebuah upacara adalah sesuatu yang mutlak harus ada. Upacara ritual kolektif dalam perayaan Cap Go Meh diyakini memiliki fungsi sosial yang dapat meningkatkan solidaritas masyarakat. Para Tatung yang berada dibawah pembinaan Majelis Tridharma dan Majelis Tao Indonesia resort Singkawang menjadikan momen Cap Go Meh sebagai pembuktian fungsi mereka sebagai meditor bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan para dewa untuk membersihkan wilayah mereka dari musibah, sekaligus

mengajarkan semangat multikulturalisme dalam sebuah wilayah yang majemuk.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**



Dinamika keberagaman umat di Indonesia menjadikan negeri ini berada di titik rawan bagi munculnya konflik dan permusuhan serta perpecahan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan faham atau keyakinan baik internal maupun eksternal. Pergumulan agama dan budaya di era gangguan ini menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam, mengingat belum mampunya umat menjadikan agamanya sebagai panduan kehidupan yang melahirkan kerukunan, ketertiban, harmoni dan daya membangun.

Sementara itu kapitalisasi telah menjadi budaya baru masyarakat yang serba instant dan materialis, sehingga pesan-pesan moral agama tertutup oleh upaya pemilik modal

mendatangkan benefit yang sebanyak-banyaknya. Akibatnya nilai-nilai agama direduksi oleh nilai-nilai ekonomi dengan topeng religiusitas. Untuk itu diperlukan pembumian terstruktur nilai-nilai agama dalam wilayah sosio historis sehingga dapat melahirkan budaya baru, dengan melakukan adaptasi dan konstruksi agar nilai agama dapat lestari dan menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan.

Misalnya bagaimana menghadirkan konsep baru pendidikan agama yang dapat melahirkan karakter atau kepribadian anak didik yang agamis dan toleran sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru, murid dan masyarakat, serta terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan baik sosial politik ekonomi dan budaya.

Begitupun dengan persoalan kebebasan beragama dan hak menjalankan agama sesuai keyakinan yang membutuhkan dialog secara intensif dan berkelanjutan dari semua pihak agar konstruk kehidupan keagamaan masyarakat menjadi tertib, santun dan saling mendamaikan. Saat ini diperlukan strategi dan solusi memperlakukan ajaran dan kelompok yang berbeda dari mainstream dan membangun jalan dialog agar terjadi

peningkatan jaminan melaksanakan keyakinan dan kerjasama antar penganut.

## BIBLIOGRAPHY



Abdullah, Amin, “Kebebasan Beragama atau Keyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-agama dan Keindonesiaan. *Makalah Expert Conference on Shariah and Human Right*. Malang : PPS UMM dan Oslo Coalition Norway, 13-15 Juni 2010

Adeney, Bernard, *Civil Society dan Abrahamic Religions*. Yogyakarta: UKDW, 2000.

Bagir, Zainal Abidin, “Pluralisme Pemaknaan dalam Sains dan Agama: Beberapa Catatan Perkembangan Mutakhir Wacana “Sains dan Agama”, dalam *Relief, Journal of Religious Issues*, Volume 1, no. 1, 2003.

Banks, J.A. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn & Bacon, 1999.

[Bertens](#), K, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Chelebi, Katib (Mustafa Ibn ‘Abdullah), *The Balance of Truth*,  
Terjemahan G.L. Lewis, George Allen, and Unwin,  
London, 1957.

Fakhry, Majid, *Etika dalam Islam*, Pustaka Pelajar bekerjasama  
dengan Pusat Studi Islam Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 1996.

Foucault, Michel, *Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago:  
The University of Chicago Press, 1982, 1983.

Geertz, C. *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York:  
Basic Books, 1973.

Jiahjim, crcs\_mailinglist, 2007

Kayam, Umar. *Sri Sumarah Dan Cerita Pendek Lainnya*. Jakarta:  
Pustaka Jaya, 1986.

Kleden, Ignas, “Kebudayaan Pop: Kritik dan Pengakuan”,  
dalam *Prisma*, Edisi 5 Mei 1987.

Mu’arif, *Merawat Muhammadiyah: Kritik Seabad Gerakan  
Pembaruan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Prasetyo, Eko. *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

Rawls, John, [\*A Theory of Justice\*](#). USA: Harvard University Press, 1971.

Riyanto, Waryani F. *Korupsi dan Budaya*, makalah, Yogyakarta, 2006.

Spradley, J. P, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*. Chicago: Science Research Associates, 1972.

Suprayogo, Bambang dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Grafika, 2001.

Walzer, Michael, *Thick and Thin Moral Argument at Home and Abroad*. University of Notre Dame Press Notre Dame London, 1994.



## **TENTANG PENULIS**







**Samsul Hidayat**, lahir di Singkawang (11/15/1973), menamatkan sekolah di MI Muhammadiyah Setapak Besar (1986), MTs Muhammadiyah Setapak Besar (1989), MAN Ushuluddin Singkawang (1992). Gelar Sarjana Agama diraih di Universitas Muhammadiyah Surakarta (1997) Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Perbandingan Agama. Lalu studi S2 meraih gelar Master of Art (MA) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2005) Prodi Perbandingan Agama (*Religious and Cross Cultural Studies*) dan meraih gelar Doktor bidang *Islamic Studies* konsentrasi Perbandingan Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Beberapa karya tulis dipublikasi dalam buku dan jurnal terkait Studi Agama-agama seperti: *Kaleidoskop Studi Agama-Agama* (Pustaka Amma Alamia), *Spirituality and Holiness in Buddhism* (Pustaka Amma Alamia), *Syncretization Of Chinese Religion In*

*Singkawang West Kalimantan* (Jurnal al-Albab), *Understanding Confucianism in West Kalimantan* (Jurnal al-Albab), *Sacred Science Vs. Secular Science: Carut Marut Hubungan Agama Dan Sains* (Jurnal Kalam), *The Role Of Chinese Social Organization In The Community Of Singkawang City* (STAINPress), *Agama Khonghucu* (IAINress), *Stereotip Mahasiswa IAIN Pontianak terhadap agama Baha'i* (Jurnal Religio), *The Way Muslims Understand Physis of Jesus*, (Jurnal Al-Albab), *The Secret of Spiritual Body*, *Rahasia Rukun Islam dan Gerbang Kesadaran Spiritual* (Erlangga), dan beberapa tulisan lain yang dipublish baik di jurnal online maupun offline.

Penulis saat ini aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama Prov Kalbar, Majelis Adat Budaya Melayu Prov Kalbar, MUI Prov Kalbar dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar. Saat ini Samsul Hidayat merupakan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak dan dapat dihubungi di [samsulhidayat892@gmail.com](mailto:samsulhidayat892@gmail.com) atau 085245111174.